

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul (Tinjauan Yuridis pelaksanaan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum). Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini oleh karena pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum di lapangan masih banyak persoalan antara lain yaitu mengenai penolakan dari pemilik tanah serta masalah tuntutan ganti rugi. Akibatnya kemudian dalam pelaksanaan pengadaan tanah sering kali muncul sengketa atau konflik antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah.

Adapun rumusan masalah yang diangkat skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan permasalahan yang terjadi pada saat proses pengadaan tanah dan bagaimana proses pemberian ganti ruginya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data dilakukan dari sumber primer dengan cara wawancara pada pejabat/pegawai Kantor Bina Marga Kota Semarang, dan sumber sekunder dari undang-undang atau peraturan, literatur-literatur yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bahan-bahan hukum tersier lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang kurang baik menyebabkan proses pembangunan di Jalan Jolotundo Semarang menjadi kompleks. Permasalahan yang terjadi pada saat proses pengadaan tanah dan proses pemberian ganti rugi terkait dengan penetapan pengertian umum, dimana terdapat perbedaan prespektif cukup tajam antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci: yuridis, pengadaan tanah untuk kepentingan umum

ABSTRACT

This research is about (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum). The background of this research is due to soil foundation by government to provide an accessibility un field remains. a problem such as disdaimer by the land owner laso charge of retribution the effect of soil foundation appears by conflict between the government and the authorization.

The main problem of this research is about soil foundation by government to provide an accesbility and the problem remains during the its process and charge of retribution.

The method that used in this study is empirical juridical with descriptive analytical research specification. Method of data collection came from primary sources by interviewing the officers/employees of the Dinas Bina Marga Semarang, and the secondary sources from of legislation or regulations, literature related to the land procurement for public interests, and other tertiary legal materials. The data then analyzed qualitatively.

Based on the results of this study it was concluded that poorly planning led to the complexity of development process in Jalan Jolotundo Semarang. The problems that occur during the process of land acquisition and compensation process associated with the establishment of a general sense, where there were differences that quite sharp between the government's perspectives with the public.

Keywords: Land Acquisition, Public Interest, Transparency of Compensation.